

# Analisis Laporan Audit Kinerja Pengelolaan Piutang Jangka Panjang di LKPP Tahun 2023

Aulia Hilda Pertiwi<sup>1</sup> | Oman Rusmana<sup>1</sup>

1. Universitas Jenderal Soedirman

## Correspondence addressed to:

Aulia Hilda Pertiwi, Universitas Jenderal Soedirman  
Email: [auliahiper123@gmail.com](mailto:auliahiper123@gmail.com)

Pertiwi, A, H., & Rusmana, O. (2025). Analisis Laporan Audit Kinerja Pengelolaan Piutang Jangka Panjang di LKPP Tahun 2023. *Wacana Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, 24(2), 150-156

**Abstract.** *Performance audit reports are an important instrument in assessing the effectiveness of resource management by government agencies. This article analyzes the results of the performance audit of long-term receivables management at the Government Goods/Services Procurement Policy Agency (LKPP) in 2023. The purpose of this study is to identify weaknesses and opportunities for improvement in the receivables management process. Using a qualitative descriptive approach based on secondary data from the audit report of the Audit Board of Indonesia (BPK), several major problems were found, including weaknesses in the information system, weak handling of problematic receivables, and inconsistencies in recording between units. The results of the analysis provide recommendations to improve the effectiveness and efficiency of long-term receivables management at LKPP*

**Keywords:** *financial management; effectiveness; LKPP; long-term receivables; performance audit*

## Pendahuluan

Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel merupakan pilar utama dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu komponen dalam neraca keuangan negara adalah piutang yang mencerminkan hak tagih pemerintah terhadap pihak ketiga atas transaksi masa lalu. Dalam konteks pengelolaan fiskal, piutang yang tidak dikelola secara efektif tidak hanya berisiko menurunkan kualitas aset negara, tetapi juga berpotensi mengganggu arus kas serta akurasi penyusunan kebijakan berbasis data.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 menunjukkan nilai piutang jangka panjang pemerintah tercatat sebesar Rp 49,19 triliun dari Rp 53,57 triliun pada tahun sebelumnya. Disisi lain, penyisihan piutang tak tertagih yang masih tinggi mencapai Rp 4,42 triliun yang mengindikasikan adanya risiko gagal tagih yang signifikan. Kondisi ini diperparah oleh minimnya informasi naratif dalam laporan terkait strategi pengelolaan, upaya penagihan, maupun evaluasi risiko piutang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan piutang negara serta keselarasan praktik yang ada dengan prinsip-prinsip manajemen aset dan risiko yang baik.

Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kemampuan pemerintah dalam mengelola aset secara cermat dan efisien, termasuk piutang jangka panjang menjadi semakin krusial. Oleh karena itu, diperlukan kajian kritis terhadap kinerja pengelolaan piutang jangka panjang sebagaimana tercermin dalam LKPP Tahun 2023, untuk mengindikasikan kelemahan, memahami risiko, dan menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat memperkuat sistem pengelolaan keuangan negara ke depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam temuan audit kinerja pengelolaan piutang jangka panjang di LKPP tahun 2023. Fokus utama

dari analisis ini adalah menilai aspek efektivitas dan efisiensi pengelolaan piutang, mengidentifikasi faktor penyebab kelemahan, serta memberikan rekomendasi strategis perbaikan yang dapat diterapkan guna memperkuat tata kelola keuangan di lingkungan LKPP.

## Kajian Pustaka

### Audit Kinerja di Sektor Publik

Audit kinerja (performance audit) merupakan bentuk pemeriksaan yang menilai apakah kegiatan, program, atau organisasi pemerintah telah dijalankan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan ekonomis (*value for money*). Menurut BPK RI (2020) dalam *Pedoman Pemeriksaan Kinerja*, audit kinerja bertujuan untuk memberikan keyakinan atas pelaksanaan tugas pemerintah dengan penggunaan sumber daya secara optimal, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, Lapsley & Pong (2000) menjelaskan bahwa audit kinerja berbeda dari audit keuangan tradisional karena lebih menekankan pada proses dan hasil (outcome) ketimbang hanya sekadar kepatuhan terhadap aturan akuntansi. Dalam konteks ini, pengelolaan piutang sebagai bagian dari proses keuangan harus dianalisis tidak hanya dari aspek pencatatan, tetapi juga dari efektivitas penagihan, pengawasan, dan mitigasi risiko piutang macet.

### Manajemen Piutang Jangka Panjang

Piutang jangka panjang merupakan aset yang timbul dari transaksi yang pembayarannya diharapkan akan diterima setelah satu tahun atau lebih. Dalam teori akuntansi sektor publik, pengelolaan piutang yang baik meliputi proses identifikasi, pencatatan, pemantauan, serta penagihan yang sistematis. Mardiasmo (2018) dalam bukunya *Akuntansi Sektor Publik* menyatakan bahwa piutang pemerintah harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang memadai agar tidak terjadi piutang tak tertagih (*bad debts*).

Lebih lanjut, menurut Anthony & Young (2017) dalam *Management Control in Nonprofit Organizations*, penting bagi lembaga pemerintah untuk mengklasifikasikan piutang berdasarkan tingkat risiko dan melakukan penghapusan (*write-off*) terhadap piutang yang tidak layak tagih sebagai bagian dari pengelolaan yang sehat dan realistis.

### Tata Kelola Keuangan Publik

Prinsip tata kelola keuangan publik (*public financial management*) yang baik mencakup akuntabilitas, transparansi, pengendalian internal yang kuat, dan audit yang independen. OECD (2015) dalam dokumen *Principles of Budgetary Governance* menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus mampu menyajikan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan publik.

Sementara itu, Goddard et al. (2016) dalam kajiannya tentang governance di sektor publik menekankan pentingnya integrasi sistem informasi dalam mendukung keterbukaan dan sinkronisasi data keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan audit di LKPP, di mana lemahnya sistem informasi menjadi salah satu penyebab ketidaktepatan pencatatan piutang jangka panjang.

### Kerangka Teoritis Penilaian Kinerja

Kerangka penilaian kinerja dalam pengelolaan piutang dapat dikaitkan dengan model 3E (Economy, Efficiency, Effectiveness).

*Economy*: sejauh mana sumber daya yang digunakan untuk mengelola piutang diperoleh dengan biaya yang wajar.

*Efficiency*: perbandingan antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan dalam proses penagihan piutang.

*Effectiveness*: sejauh mana hasil yang dicapai (misalnya, jumlah piutang tertagih) sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Model ini menjadi dasar dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pengelolaan piutang di instansi pemerintah, termasuk di LKPP.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam hasil audit kinerja pengelolaan piutang jangka panjang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2023. Pendekatan ini dipilih karena bersifat eksploratif dan interpretatif, yang memungkinkan peneliti memahami konteks, latar belakang, dan makna di balik temuan audit kinerja secara menyeluruh. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan, penyebab, serta dampak dari pengelolaan piutang jangka panjang yang ditemukan dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang berbasis data dan kerangka teori yang relevan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi yang telah tersedia, baik dalam bentuk laporan audit maupun regulasi yang berlaku. Sumber data utama meliputi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPP tahun 2023, khususnya bagian yang membahas pengelolaan piutang jangka panjang; Laporan Keuangan LKPP Tahun 2023 (baik versi unaudited maupun audited); serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, referensi akademik seperti buku teks dan jurnal ilmiah juga digunakan untuk memperkuat landasan konseptual dan mendukung proses analisis data.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji dan menelaah dokumen-dokumen yang relevan secara sistematis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan analisis tematik. Langkah-langkah analisis dimulai dari reduksi data untuk menyaring informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk narasi dan temuan kunci, serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola yang muncul dari data. Peneliti juga membandingkan temuan audit tahun 2023 dengan data audit tahun sebelumnya (jika tersedia), guna mengetahui perkembangan atau konsistensi kelemahan dalam pengelolaan piutang.

Untuk menjaga validitas dan keandalan hasil analisis, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari beberapa dokumen, termasuk laporan keuangan dan peraturan terkait. Selain itu, dilakukan audit trail terhadap proses analisis dan diskusi terbatas (*peer debriefing*) dengan pihak yang memahami akuntansi sektor publik, untuk menguji keakuratan interpretasi data. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai pengelolaan piutang jangka panjang di LKPP serta memberikan masukan yang konstruktif bagi perbaikan ke depan.

## Result and Discussion

Berdasarkan hasil analisis terhadap Laporan Audit Kinerja Pengelolaan Piutang Jangka Panjang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2023, diperoleh beberapa temuan utama:

---

### Peningkatan Nilai Piutang Jangka Panjang

Dalam neraca pemerintah pusat per 31 Desember 2023, tercatat nilai piutang jangka panjang sebesar Rp 49,19 triliun, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 53,57 triliun. Penurunan ini terutama terjadi pada akun piutang pemberian pinjaman dan piutang panjang lainnya yang menurun sekitar Rp 4 triliun secara total. Penyisihan piutang tak tertagih juga masih cukup tinggi yaitu Rp 4,42 triliun. Hal ini menandakan risiko piutang bermasalah masih signifikan. Penurunan yang terjadi mencerminkan adanya perubahan struktur portofolio piutang yang berasal dari Pelunasan sebagian kewajiban pinjaman oleh pihak ketiga misalnya pemerintah daerah atau BUMN penerima pinjaman; Reklasifikasi piutang jangka panjang menjadi piutang jangka pendek; atau Penghapusan piutang karena alasan ketidaktertagihan (yang dicatat sebagai kerugian).

Lebih rincinya, penurunan ini terbesar terjadi pada piutang pemberian pinjaman, dari Rp 52,97 triliun (2022) menjadi 48,64 triliun (2023) berkurang sekitar Rp 4,33 triliun. Sementara piutang jangka panjang lainnya juga menurun dari Rp 4,78 triliun menjadi Rp 4,57 triliun. Namun demikian, walaupun nilai piutang menurun, nilai penyisihan piutang tak tertagih masih sangat tinggi, yaitu sebesar Rp 4,42 triliun, hanya turun sedikit dari tahun sebelumnya yaitu berkisar Rp 4,53 triliun. Ini mengindikasikan bahwa sebagian piutang telah menurun nilainya, kualitas piutang yang tersisa masih mengandung risiko gagal tagih yang cukup tinggi.

**Tabel 1.** Komposisi dan Perubahan Subkomponen Piutang Jangka Panjang

Jenis Piutang	Tahun 2022 (Rp Triliun)	Tahun 2023 (Rp Triliun)	Selisih
Pemberian pinjaman	52,97	48,64	-4,33
Lainnya	4,78	4,58	-0,20
TP/TGR & Angsuran	0,28	0,39	0,11
<b>Total Bruto</b>	<b>58,11</b>	<b>53,61</b>	<b>-4,50</b>
<b>Penyisihan</b>	<b>(4,54)</b>	<b>(4,42)</b>	<b>0,12</b>
<b>Total Bersih</b>	<b>53,57</b>	<b>49,19</b>	<b>-4,38</b>

Penurunan nilai piutang jangka panjang dari Rp 53,57 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp 49,19 triliun pada tahun 2023 tidak dapat diartikan sebagai pencapaian positif dalam pengelolaan piutang pemerintah. Tanpa penjelasan rinci mengenai sumber penurunan tersebut, terdapat potensi bahwa penurunan ini justru mencerminkan penghapusan piutang, reklasifikasi ke piutang jangka pendek, atau penyesuaian administratif, bukan hasil dari penagihan aktif.

Selanjutnya, keberadaan penyisihan piutang tak tertagih yang masih tinggi (Rp.4,42 triliun atau sekitar 9% dari total) menegaskan bahwa kualitas piutang yang tersisa pun masih menghadapi risiko gagal tagih yang cukup besar. Ditambah lagi, tidak tersedianya *aging schedule*, evaluasi kolektibilitas, maupun data pemulihan piutang selama tahun berjalan dalam CaLK membuat transparansi pengelolaan piutang menjadi terbatas dan tidak dapat diverifikasi secara kuantitatif oleh publik.

Dengan kata lain, penurunan nilai piutang jangka panjang bukanlah indikator keberhasilan manajemen, melainkan justru dapat menjadi indikator lemahnya pengawasan, pelaporan, dan pengendalian risiko piutang. Kondisi ini menuntut adanya pembaruan dalam sistem pengelolaan piutang pemerintah, baik dari sisi informasi, audit maupun tata kelola strategis.

### Penyisihan Piutang Tak Tertagih Masih Tinggi

Tercatat dalam neraca bahwa pemerintah mencatat penyisihan piutang tak tertagih untuk piutang jangka panjang sebesar Rp 4,42 triliun sedikit menurun dari tahun 2022 yang sebesar Rp 4,53. Meskipun mengalami penurunan sekitar 2,56% jumlah tersebut tetap merepresentasikan risiko kolektibilitas yang tinggi terhadap piutang negara.

**Tabel 2.** Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih (2023)

Kategori Piutang	Penyisihan 2023	Penyisihan 2022	Perubahan
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	31,826	35,860	11,25%
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	183,538	234,945	21,88
Piutang Pemberian Pinjaman	836,493	864,846	3,28
Piutang Jangka Panjang Lainnya	3,369	3,401	0,95%
<b>Total Penyisihan</b>	<b>4,421</b>	<b>4,537</b>	<b>2,56%</b>

Sumber: LKPP 2023- Catatan atas Laporan Keuangan, Halaman 147

Tingginya nilai penyisihan piutang tak tertagih yang tercatat dalam LKPP 2023, yakni sebesar Rp 4,42 triliun untuk piutang jangka panjang, mencerminkan bahwa portofolio piutang negara masih berada dalam kondisi berisiko tinggi dan belum dikelola secara optimal. Meskipun terjadi sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, rasio penyisihan terhadap total piutang jangka panjang tetap tinggi, yaitu mencapai lebih dari 8% mengindikasikan kelemahan struktural dalam kolektibilitas aset negara.

Ketiadaan informasi rinci dalam CaLK mengenai metodologi perhitungan penyisihan, klasifikasi risikom dan hasil evaluasi piutang per kategori menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan risiko piutang, ini dapat menggelapkan kondisi keuangan sebenarnya dan menyulitkan pihak pengambil kebijakan dalam melakukan evaluasi fiskal yang tepat sasaran.

Terlebih lagi, ditemukannya piutang yang disisihkan 100% (karena dinilai tidak akan tertagih) seperti piutang terhadap PT TPPI dan beberapa entitas swasta strategis, menandakan kegagalan dalam proses awal pemberian pinjaman maupun pengendalian piutang. Hal ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan perubahan total dalam kebijakan piutang, mulai dari pemberian, pencatatan, penagihan hingga penghapusan.

Dengan demikian, penyisihan piutang tak tertagih yang tinggi bukan hanya angka akuntansi semata, tetapi menjadi indikator kegagalan sistematis dalam manajemen aset negara yang membutuhkan tindakan korektif baik dari sisi teknis, regulatif maupun kelembagaan

### Tidak Ditemukannya Penjelasan Rinci Pengelolaan Piutang

Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), tidak terdapat uraian khusus atau mendetail mengenai kebijakan dan mekanisme pengelolaan piutang jangka panjang secara sistematis seperti klasifikasi risiko, strategi penagihan atau evaluasi berkala terhadap portofolio piutang. Hal ini mengindikasikan kurangnya transparansi operasional atas pengelolaan piutang secara aktif. Contoh nyata dari LKPP 2023, tercantum piutang kepada PT TPPI sebesar Rp 2,18 triliun disisihkan 100% karena digolongkan sebagai piutang macet. Namun, tidak dijelaskan upaya penyelesaian, proses hukum atau pengalihan piutang ke DJKN. Piutang BLU LMAN kepada PT Pertamina Hulu Mahakam sebesar Rp 1,06 triliun disepakati melalui perjanjian, tetapi tidak dijelaskan apakah pembayaran telah direalisasikan atau dalam proses penagihan.

Ketiadaan penjelasan rinci mengenai pengelolaan piutang dalam LKPP 2023 menunjukkan bahwa aspek manajerial dan strategis dari piutang negara belum menjadi fokus utama dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Laporan masih terfokus pada penyajian angka secara akuntansi tanpa diimbangi dengan narasi atau indikator kinerja yang menjelaskan kualitas dan efektivitas pengelolaan aset tersebut.

### Belum Optimalnya Penagihan Aktif

Pada bagian laporan arus kas dan operasional, pendapatan dari pengembalian pinjaman dan penerimaan cicilan menunjukkan kinerja relatif stagnan. Contohnya, penerimaan cicilan pengembalian

pinjaman hanya mencapai sekitar Rp 6,37 triliun, tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, mengindikasikan keterbatasan dalam upaya penagihan utang.

**Tabel 3.** Data Realisasi Penagihan Tahun 2022 dan 2023

Jenis Penerimaan	Tahun 2022	Tahun 2023	Kenaikan
Total Penerimaan	3,95 triliun	6,37 triliun	61,29%
Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Cicilan dari PT PLN (terbesar)	-	2,88 triliun	72,6%

**Sumber:** LKPP 2023, Halaman 83-84

Meskipun terdapat kenaikan signifikan dalam penerimaan cicilan pengembalian pinjaman pemerintah pada tahun 2023, dari Rp 3,95 triliun menjadi Rp 6,37 triliun, peningkatan ini tidak mencerminkan keberhasilan sistem penagihan yang kuat dan menyeluruh. Lebih dari 70% penerimaan berasal dari satu debitur besar yaitu PT PLN yang menandakan ketergantungan tinggi terhadap satu sumber pembayaran dan mencerminkan ketidakseimbangan dalam kontribusi antar debitur.

Sementara itu, kontribusi sektor lain seperti pemerintah daerah dan BUMN sangat rendah dan tidak proporsional terhadap nilai pinjaman yang diberikan. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan struktural dalam mekanisme penagihan, minimnya insentif kepatuhan serta tidak adanya strategi penagihan aktif yang terintegrasi dan berkelanjutan.

## Simpulan

Analisis terhadap LKPP Tahun 2023 menunjukkan bahwa pengelolaan piutang jangka panjang masih lemah secara strategis, ditandai dengan minimnya transparansi, ketiadaan indikator kinerja, serta tingginya penyisihan piutang tak tertagih yang mencerminkan risiko gagal tagih yang signifikan. Penurunan nilai piutang belum dapat dikatakan sebagai hasil penagihan efektif karena kurangnya penjelasan naratif dalam laporan. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat sistem pengendalian internal, menerapkan digitalisasi pengelolaan piutang, menyusun kebijakan manajemen risiko yang terukur, serta meningkatkan koordinasi lintas unit agar pengelolaan piutang lebih proaktif, akuntabel, dan berbasis data.

## Daftar Pustaka

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2020). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach* (17th ed.). Pearson.
- Setyaningrum, D., & Septiani, I. (2021). "Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Governance terhadap Pengelolaan Piutang Daerah." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(1), 25–34.
- Sari, P. M., & Nugroho, S. P. (2020). "Analisis Efektivitas Penagihan Piutang pada Instansi Pemerintah." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 201–210.
- Handayani, R., & Astuti, T. (2019). "Penerapan SAP Berbasis Akrua dalam Laporan Keuangan Pemerintah." *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 1–12.
- Tambunan, T. T. H. (2018). "Manajemen Piutang pada Lembaga Publik: Studi Empiris pada Pemerintah Daerah." *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 121–130.
- Fitriyah, A., & Rizal, A. (2022). "Implementasi Risk-Based Audit pada Pengelolaan Piutang Pemerintah." *Jurnal Audit dan Keuangan Negara*, 20(3), 78–90.
- Wibowo, E., & Saputra, A. D. (2020). "Strategi Penagihan Piutang dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 42–56.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.05/2021 tentang Pengelolaan Piutang Negara.

Diakses dari: <https://www.kemenkeu.go.id/> [Akses: 22 April 2025]

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/> [Akses: 22 April 2025]

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Diakses dari: <https://www.djpk.kemenkeu.go.id/> [Akses: 22 April 2025]

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023. Diakses dari: <https://www.bpk.go.id/> [Akses: 22 April 2025]

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 – Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI. Diakses dari: <https://www.djpb.kemenkeu.go.id/> [Akses: 22 April 2025]

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Diakses dari: <https://www.ksap.org/> [Akses: 22 April 2025]